

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2015



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Jl. Andi Mollambussang No. 59
Telp. (0411) 880529 Fax. (0411) 880202
<http://www.kpugowa.com>

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan yang akan dijadikan pedoman dan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2015 hingga tahun 2019. Rencana Strategis KPU Kab.Gowa merupakan turunan dari Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menyusun renstra 2015-2019 sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2015.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa bertekad untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum 2015-2019 yaitu “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Sungguminasa, 29 Januari 2016

Ketua

ZAINAL RUMA, S.Pd., MM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	26
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	26
2.1. Visi	26
2.2. Misi	26
2.3. Tujuan.....	27
2.4. Sasaran Strategis	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	29
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	29
3.2. Kerangka Regulasi	38
3.3. Kerangka Kelembagaan	40
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	42
4.1. Target Kinerja	42
4.2. Kerangka Pendanaan	53
BAB V PENUTUP	62
LAMPIRAN	
1) Matriks Kinerja dan Pendanaan	63
2) Sekilas tentang Pemilihan di Kabupaten Gowa.....	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Personil KPU Gowa	19
Tabel 2: Tingkat Pendidikan Pegawai.....	24
Tabel 3: Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	30
Tabel 4: Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	34
Tabel 5: Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan dan Perbaikan Proses Politik	35
Tabel 6: Target Kinerja KPU Gowa Tahun 2015-2019.....	42
Tabel 7: Kerangka Pendanaan Program KPU Gowa selama 5 Tahun (2015-2019)	54
Tabel 8: Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Gowa selama 5 Tahun (2015-2019)	55
Tabel 9: Kerangka Pendanaan Sasaran KPU Gowa selama 5 Tahun (2015-2019)	56
Tabel 10: Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Gowa	63
Tabel 11: Hasil Perolehan Putara Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2010.....	80
Tabel 12 : Hasil Perolehan Putara Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2010.....	81
Tabel 13: Hasil Perolehan Pilgub Sulsel 2013 tingkat Kab.Gowa	81
Tabel 14: BPP Pemilu Legislatif tahun 2014 tingkat Kab.Gowa.....	82
Tabel 15: Perolehan Suara Partai Politik Dapil Gowa I.....	82
Tabel 16: Perolehan Suara Partai Politik Dapil Gowa II.....	83
Tabel 17: Perolehan Suara Partai Politik Dapil Gowa III.....	84
Tabel 18: Perolehan Suara Partai Politik Dapil Gowa IV	84
Tabel 19: Perolehan Suara Partai Politik Dapil Gowa V	85
Tabel 20: Perolehan Suara Partai Politik Dapil Gowa VI	85
Tabel 20: Perolehan Suara Partai Politik Dapil Gowa VII.....	85
Tabel 21: Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa I	86
Tabel 22: Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa II	86

Tabel 23: Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa III	87
Tabel 24: Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa IV	87
Tabel 25: Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa V	88
Tabel 26: Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa VI	88
Tabel 26: Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa VI	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1 : Struktur Organisasi Komisioner KPU Gowa	17
GAMBAR 2 : Struktur Organisasi Sekertariat KPU Gowa	18
GAMBAR 3 : Konfigurasi SDM KPU Gowa	21
GAMBAR 4 : Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kab.Gowa	89
GAMBAR 5 : Tingkat Partisipasi Pemilih Kab.Gowa	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lingkup Kabupaten Gowa.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum antara lain sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan Berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
- merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 - mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

- menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,

bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- melaksanakan keputusan DKPP; dan
- melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi beserta tugas-tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu di Kabupaten/Kota;
- Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu di Kabupaten/Kota;
- Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan pemilu di Kabupaten/Kota;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kabupaten/Kota;
- Membantu pelayanan pemberian informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten/Kota;
- Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kabupaten/Kota;
- Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilu di Kabupaten/Kota;
- Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

3. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota;
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

5. Tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Subbagian program dan data, yang mempunyai tugas, mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu;
- Subbagian hukum, yang mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluh peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual beserta pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye;
- Subbagian teknis dan hubungan partisipasi masyarakat, yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi pergantian antara waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, penetapan daerah pemilihan, dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih;

- Subbagian keuangan, umum, dan logistik, yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

7. Staf pelaksana pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota

a. Staf pelaksana pada subbagian program dan data mempunyai tugas:

- Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu;
- Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;
- Mengelola, menyusun data pemilih;
- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah;
- Melakukan survei untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;
- Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan data;
- Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU kabupaten/kota;
- Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan merencanakan anggaran Proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
 - Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- b. Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas:
- Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu;
 - Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu;
 - Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
 - Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu;
 - Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu;
 - Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
 - Menyusun dan mengelola verifikasi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
 - Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu;
 - Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu;
 - Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu;
 - Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di subbagian hukum;

- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum;
 - Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian hukum Kabupaten/Kota;
 - Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- c. Staf pelaksana pada subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat mempunyai tugas:
- Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilu;
 - Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
 - Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;

- Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
 - Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 - Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 - Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat;
 - Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu;
 - Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbag teknis dan hubmas;
 - Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- d. Staf pelaksana pada subbagian keuangan, umum, dan logistik mempunyai tugas :
- 1) Keuangan
 - Mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan;
 - Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan mengelola bahan peniliti laporan keuangan;
 - Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
 - Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
 - Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;

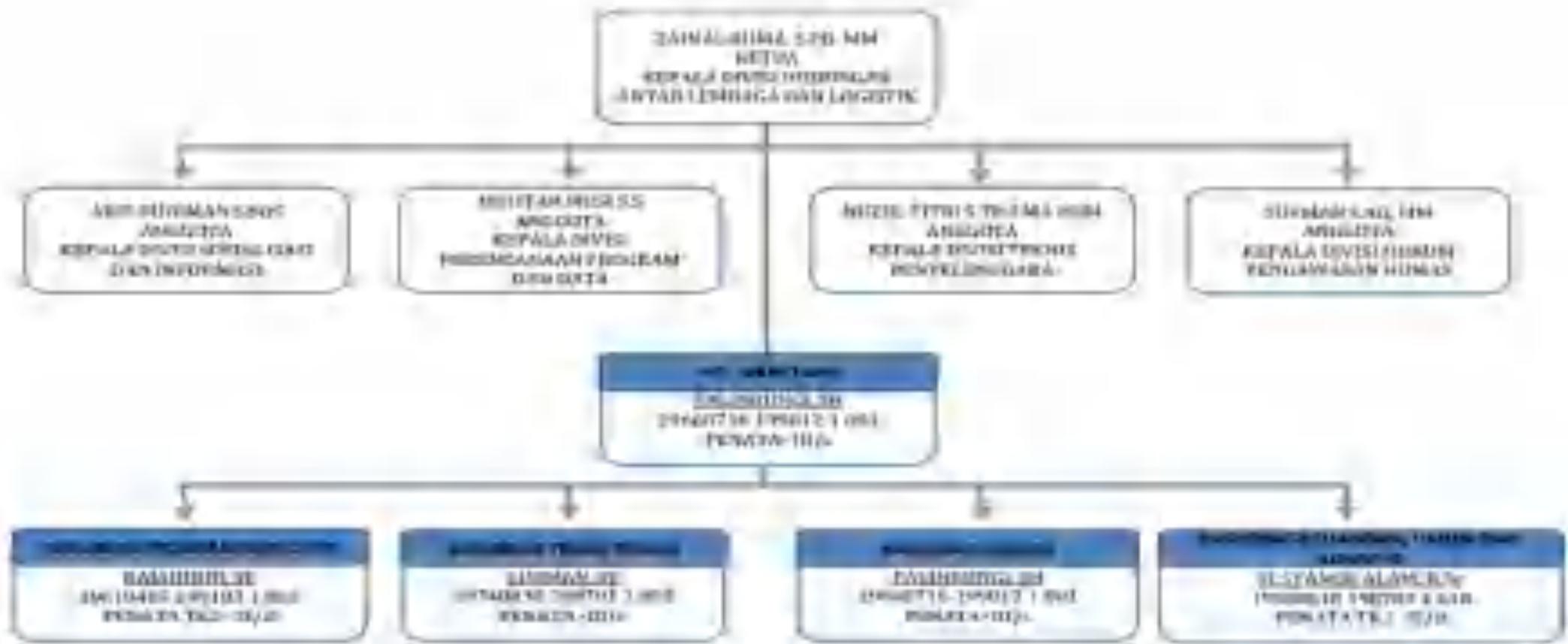
- Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
 - Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
 - Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
 - Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
 - Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan pemilu;
 - Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
 - Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
 - Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- 2) Umum:
- Mengelola dan menyusun rencana subbagian umum;
 - Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyerat dan ekspedisi;
 - Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan, dan pengadaan naskah dinas;
 - Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
 - Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;

- Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
 - Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
 - Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
 - Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
 - Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
 - Mengumpulkan dan menyusun arsip inaktif;
 - Mengelola dan memelihara bahan inventaris milik negara;
 - Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
 - Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- 3) Logistik:
- Mengelola dan menyusun rencana subbagian logistik;
 - Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu;
 - Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya;
 - Mengalokasikan barang keperluan pemilu;
 - Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu;
 - Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

- Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
- Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dipaparkan bahwa Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Pada bagan 1.1 digambarkan terkait struktur dan pembagian divisi komisioner pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa periode 2013-2018. Dalam menjalankan tugas, komisioner KPU Kabupaten Gowa dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang mendukung kelancaran tugas dan wewenang. Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa digambarkan dalam Bagan.

**GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI
KPU KABUPATEN GOWA TAHUN 2013-2018**



Hingga renstra ini dibuat, ada 39 total personil yang bertugas di KPU Kabupaten Gowa termasuk komisioner. Berikut uraiannya:

Tabel 1
Personil KPU Kabupaten Gowa

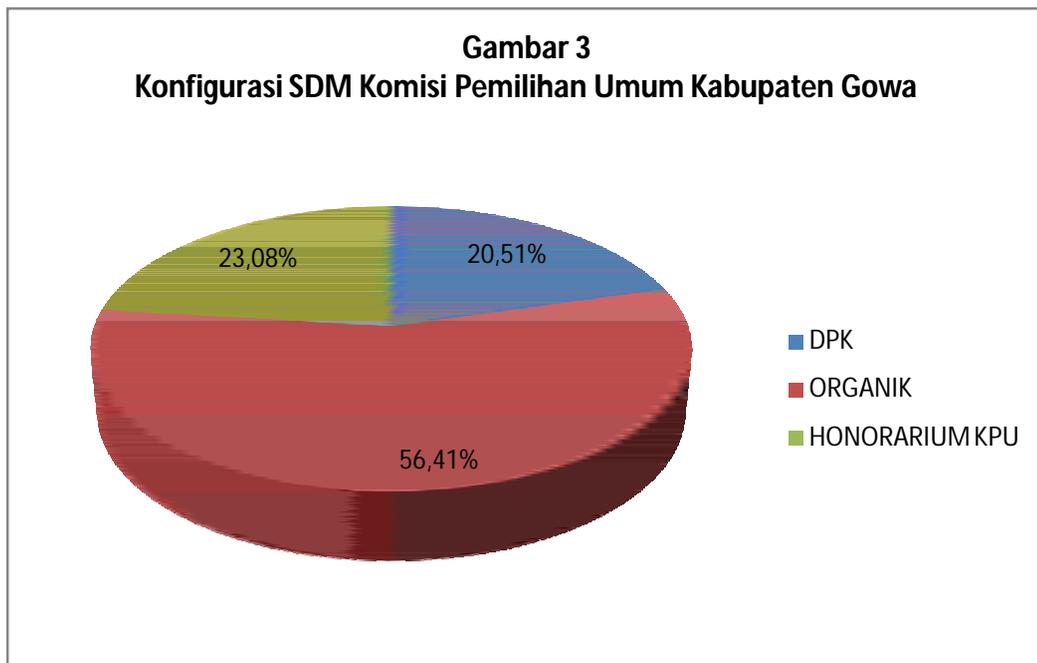
NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
KOMISIONER KPU GOWA			
1	ZAINAL RUMA, S.PD, M.M.	KETUA	KOMISIONER KPU GOWA PERIODE 2013-2018
2	ARIF BUDIMAN, S. SOS.	ANGGOTA	KOMISIONER KPU GOWA PERIODE 2013-2018
3	MUHTAR MUIS, S.S.	ANGGOTA	KOMISIONER KPU GOWA PERIODE 2013-2018
4	SUKMAN, S. AG. M.M	ANGGOTA	KOMISIONER KPU GOWA PERIODE 2013-2018
5	NUZUL FITRI, S. TH. I., MA. HUM	ANGGOTA	KOMISIONER KPU GOWA PERIODE 2013-2018
SEKRETARIAT KPU GOWA			
1	PALINRUNGI, SH	PLT SEKRETARIS	PNS DAERAH
2	RAJAHINDI, SE	KA SUB PROGRAM DAN DATA	PNS DAERAH
3	H. SYAMSU ALAM,BSC	KA SUB KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	PNS DAERAH
4	LUKMAN, SE	KA SUB TEKNIS DAN HUPMAS	PNS ORGANIK KPU
5	HJ.RAHMANIAR, BSC	STAF SEKRETARIAT	PNS DAERAH
6	BAHARUDDIN, S.SOS	STAF SEKRETARIAT	PNS DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
7	ST. NURLELA, SE	STAF SEKRETARIAT	PNS DAERAH
8	TAUFAN AZHADY I, SH	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
9	A. DHARMAWAN	STAF SEKRETARIAT	PNS DAERAH
10	PIETER BANA	STAF SEKRETARIAT	PNS DAERAH
11	DAHMIYA	STAF SEKRETARIAT	PNS DAERAH
12	ASRUL MUSTAFA GANI, SE	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
13	SURIAWATI, S.KOM	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
14	SYAMSUL BAHRI, SE	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
15	HASMIATI AMIN, SE	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
16	EKA HERMAWATI, SE	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
17	SRI INDRAYANTI, S.SOS	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
18	ASRIYANI RAHMAN.SE	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU DI PERBANTUKAN DI KPU KAB LUWU UTARA
19	ASMAWATI A.,SH	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
20	SALMAWATI, S.SOS	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
21	FAISAL HAMZAH BARLIAN, S.SOS	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
22	FIRMANSYAH,ST	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
23	FATRAH NURLIAH.,S.SOS	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
24	TOUVANI MAJID, S.SOS	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
25	NIRWANA, A.MD.KOM	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
26	MELDAWATI, A.MD	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
27	MUSLIM, S.SOS	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
28	FARID YUSDIANSAH, S.SOS	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
29	MUSTARI	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
30	AKBAR	STAF SEKRETARIAT	PNS ORGANIK KPU
31	SYUBAIR RACHIM	DRIVER	HONORER APBN/DATABASE
32	ZUHRIYADI	TENAGA PENGAMANAN	HONORER APBN
33	AHMAD SAID. M, SH	PETUGAS KEBERSIHAN	HONORER APBN
34	AGUSALIM AMIR	PETUGAS KEBERSIHAN	HONORER APBN
35	MATIA	PETUGAS KEBERSIHAN	HONORER APBN

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
36	FACHRURRAZY	DRIVER	HONORER APBN
37	JAKARIA	TENAGA PENGAMANAN	HONORER APBN
38	ABDUL RACHMAN SYAM, SE	TENAGA PENGAMANAN	HONORER APBN
39	MOH.REZKY SEPTIAWAN.S	DRIVER	HONORER APBN

Komposisi kepegawaian di KPU Kabupaten Gowa dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Penjelasan dari grafik tersebut yaitu jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa berjumlah 39 orang, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yaitu PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kab.Gowa, berjumlah 8 orang atau 20,51%. Masing-masing adalah pejabat yang menduduki jabatan sebagai Plt sekretaris KPU Gowa, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik, , serta Kasubag Hukum;

2. Pegawai dengan status pegawai organik, yaitu PNS yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum adalah berjumlah 22 orang, atau 56,41%. Dua Puluh Dua orang tersebut yaitu terdiri dari 1 orang Kasubag yaitu Kasubag Teknis dan Humas, serta 21 orang staf yang tersebar di 4 sub bagian;
3. Pegawai dengan status Honorarium KPU yaitu berjumlah 9 orang atau 23,08%. Kelima orang tersebut masing-masing terdiri dari 3 orang Satuan Pengamanan (Satpam), 3 orang Supir, dan 3 orang Pramubakti;

Berdasarkan grafik 3 dengan penjelasannya, terlihat bahwa komposisi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa cukup terpenuhi

Terkait sarana dan prasarana, Kantor KPU Kabupaten Gowa masih berstatus Pinjam Pakai. Hingga saat ini, KPU Kabupaten Gowa belum mendapatkan tanah hibah dari Pemerintah Daerah Gowa.

Sejalan dengan upaya KPU dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, dalam hal menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan sesuai aturan, maka KPU Kabupaten Gowa pun selalu berupaya menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku. KPU Kabupaten Gowa menyadari akan begitu besarnya peran KPU Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan opini atas laporan keuangan KPU yang saat ini masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peran KPU Daerah sangat menunjang pencapaian peningkatan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan agenda reformasi birokrasi yang telah dirumuskan oleh Komisi Pemilihan Umum antara lain:

1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui penerapan SOP dan sistem informasi e-government yang

terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholder;

3. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
5. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah membuktikan eksistensinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Gowa yang tetap mendukung program Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan organisasi yang mandiri, profesional, adil dan transparan dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari upaya KPU Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dimana KPU Kabupaten Gowa yang merupakan perpanjangan tangan dari KPU RI telah melaksanakan seluruh program-program KPU RI termasuk dalam keterbukaan informasi publik. Pada pemilu tahun 2014, beberapa sistem informasi KPU yang telah dijalankan oleh KPU Kab.Gowa yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum. Selain itu, KPU Kab.Gowa telah membuktikan integritas dan profesionalismenya, dimana telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2014 dengan baik, dan beberapa gugatan pada pemilu legislatif dapat dimenangkan. Seluruh tahapan dapat diselesaikan dengan baik walaupun terdapat penghitungan suara ulang dalam tahapan PILEG 2014. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari adanya komunikasi yang intens yang dibangun dengan semua pihak termasuk dengan stakeholder dan pihak pengamanan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Sebagai lembaga dibentuk berdasarkan Keputusan KPU Nomor :451/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009, tentang Pembentukan 22 (dua puluh dua) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan mulai aktif pada tahun 2010, KPU Kabupaten Gowa telah melalui 4 kali pemilihan sejak tahun 2010 hingga tahun 2014, yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2010, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi selatan tahun 2013, Pemilihan Legislatif Tahun 2014, dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014. Dari 4 pemilihan tersebut, semua dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, dan KPU Kabupaten Gowa dapat menyelesaikan segala jenis permasalahan yang muncul.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Berdasarkan aspek SDM, KPU kabupaten Gowa memiliki 39 pegawai baik pegawai pemda maupun pegawai organik KPU yang terdiri dari PNS dan honorarium, dengan berbagai latar belakang pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Pegawai

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S1	25 orang
2	D3	3 orang
3	SMA	2 orang

1.2.2. Permasalahan

a. Sarana dan Prasarana

Beberapa permasalahan terkait Sarana dan Prasarana KPU Gowa yaitu sebagai berikut:

- Keterbatasan computer unit dimana yang terdaftar di BMN tidak semuanya dapat berfungsi karena kondisinya rusak berat
- Ruang kerja yang belum memadai dimana jumlah ruangan dan jumlah pegawai tidak sebanding
- Kurangnya sarana kelengkapan operasional kantor

b. SDM

Permasalahan terkait Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Gowa yaitu terbatasnya pegawai yang memiliki sertifikat PJB dan Bendahara

c. Dukungan Infrastruktur

Asset tetap (tanah) masih Pinjam Pakai dari Pemerintah daerah Kabupaten Gowa

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa merujuk kepada Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Relevansinya dengan visi nasional yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk parapemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel

2.3. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

- c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab.Gowa.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Gowa

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Gowa menetapkan arah dan strategi kebijakan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa pada kurun waktu 2015-2019 akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan. Program-program dan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran (*outcome*) yang hendak dicapai dari program ini yaitu terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DUKCAPIL Kabupaten Gowa, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa. Dengan indikator kinerja programnya adalah: Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten Gowa serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;

4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa;
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa;
6. Mengikuti pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid
		Terlaksananya pelayanan perkantoran	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Persentase terupdate-nya data-data dan informasi logistik pada aplikasi silog
			Persentase pelaksanaan pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat Kab.Gowa secara terpadu mulai dari perencanaan, pengadaan dan pengiriman, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
		Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik pemilu	Persentase tertayang-nya Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi sirup secara tepat waktu

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase pelaksanaan pengelolaan dan penghapusan logistik eks pemilu dan pemilukada	
		Tersedianya data kebutuhan logistik	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat	
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah dokumen Renstra tahun 2015-2019 Persentase penyelesaian Renja K/L dan RKA K/L secara tepat waktu Persentase perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu (pengelolaan dipa dan revisi dipa)	
		Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih	Persentase pemutakhiran data pemilih	
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase terlaksananya layanan operasional dan pelayanan TI (terpeliharanya jaringan kabel internet)	
		Tersedianya data dan informasi kepemiluan	Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja Persentase penyelesaian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu (LAKIP, TAPKIN, rencana aksi, Lap.Triwulan berdasarkan PP 39 dan Lap.bulanan berdasarkan PMK 249)	
			Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Persentase pelaksanaan sistem aplikasi kepemiluan
4	Pembinaan Sumber Daya	Tingkat ketepatan tertib	Persentase keikutsertaan	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 3358	administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	dalam pelantikan pejabat struktural
			Persentase keikutsertaan dalam tes kompetensi dan tes integritas dalam rangka alih status PNS
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Persentase keikutsertaan dalam pelaksanaan Diklat Teknis dan Diklat Struktural
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan PAW Anggota KPU Kabupaten Gowa	Persentase fasilitasi proses PAW Anggota KPU Kabupaten Gowa
			Pengelolaan database kepegawaian
		Terlaksananya seleksi Anggota KPU Kabupaten Gowa	Persentase fasilitasi proses seleksi anggota KPU Gowa
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU	Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK
			Persentase pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat
			Persentase terselesaikannya tindak lanjut Tuntutan ganti Rugi (TGR) atas BMN yang hilang dengan ditetapkannya pembebanan kerugian Negara kepada penanggungjawab
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Gowa	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip	Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan di lingkungan KPU kab.Gowa
		Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Persentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
6	Pemeriksaan di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	Persentase penyusunan LAKIP 2015 yang valid dan tepat waktu
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 4

Tabel 4
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai KPU Gowa
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/Elektronik Kantor KPU Gowa

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilukada.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada table 5

Tabel 5

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase keikutsertaan dalam penyuluhan permasalahan hukum
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilu terkait administrasi kepiluan	Persentase keikutsertaan untuk menghadiri Raker/Rakor dalam rangka pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepiluan
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan dana kampanye, dan audit dana kampanye
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase keikutsertaan dalam rangka menghadiri pembekalan/penyuluhan Peraturan KPU	
			Persentase Keputusan KPU Kab.Gowa yang sesuai format

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			peraturan perundang-undangan
2	Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Persentase Proses PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah kegiatan pembentukan PPID Jumlah kegiatan penetapan dan pengisian Anggota DPRD Kab.Gowa Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada Jumlah kegiatan pelaksanaan pemilukada Persentase keikutsertaan dalam bimtek pemilukada Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilukada
			Jumlah laporan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilukada
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilukada	Jumlah kegiatan penerangan/sosialisasi pemilukada yang dilaksanakan
			Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilukada
			Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilukada
			Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Persentase ketepatan waktu dalam fasilitasi proses pencalonan dan verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015
			Persentase ketepatan waktu pengadaan, ketepatan jumlah, dan kualitas pengadaan barang dan jasa
			Persentase terfasilitasinya pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015
			Persentase terfasilitasinya penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa
			Persentase ketepatan waktu pendistribusian kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara
			Persentase pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada secara tepat waktu
			Persentase pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih Pemilukada Gowa Tahun 2015 secara tepat waktu
			Persentase pelaksanaan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan terpilih
		Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilukada	Persentase ketepatan waktu perekrutan penyelenggara pada Pemilukada

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi dalam Pemilukada
			Persentase keikutsertaan KPU Gowa dalam kegiatan terkait Pemilukada yang dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU RI
			Jumlah kegiatan bimtek penyelenggara Pemilukada yang dilaksanakan oleh KPU Kab.Gowa
			Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilukada

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kab.Gowa mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis dalam bentuk Keputusan, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan KPU dan Undang-Undang Kepemiluan. kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kab.Gowa.

Peraturan KPU yang dituangkan kedalam Keputusan KPU Kabupaten Gowa dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi berupa Keputusan KPU Kabupaten Gowa yang diperlukan yaitu:

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu
 - 1) Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
 - Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;

- Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan Calon terpilih.

2) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
- Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
- Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan Calon terpilih.

2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :
 - Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - Peraturan tentang kepegawaian;
 - Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
 - Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Upaya penguatan kelembagaan akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar satker dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;
7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
8. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/non-pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kab.Gowa akan tetap melakukan kerjasama dan koordinasi yang intens dengan Panwaslu Kab.Gowa.

Dalam hal kelancaran penyelenggaraan pemilu dalam kurun waktu 2015-2019, KPU Kab.Gowa juga akan melakukan kerjasama yang intens dengan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol, Disdukcapil, DPPKAD, pihak pengamanan (TNI dan Polri), ULP (Unit Layanan Pengadaan), lembaga riset terkait partisipasi pemilih, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akuntan publik dalam hal penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pelaporan dana kampanye. Koordinasi yang intens juga akan selalu terjalin dengan KPU dan KPU Provinsi.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Gowa akan memaksimalkan keikutsertaan para pegawai di lingkup KPU Kab. Gowa dalam hal kegiatan pelatihan/ diklat/ penyuluhan/ sosialisasi / rakor yang diadakan oleh KPU, KPU Provinsi, serta oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan KPU dan mengadakan kerjasama dengan KPU.

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU akan bekerjasama dengan TV dan Radio Lokal serta dengan media cetak dan pers.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan kepada KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi hak pilih. Untuk memfasilitasi hak pilih seluruh warga Gowa, KPU akan bekerjasama dengan Disdukcapil, Badan Kesbangpol, serta dengan jajaran pemerintahan sampai ke tingkat Desa/kelurahan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam kurun waktu 2015-2019, target yang akan dicapai oleh KPU Kabupaten Gowa diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 6
Target Kinerja KPU Kab.Gowa 2015-2019

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU							
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU 3355	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terlaksananya pelayanan perkantoran	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu 3356	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Persentase terupdatenya data-data dan informasi logistik pada aplikasi silog	100%	100%		100%	100%
			Persentase pelaksanaan pola pengelolaan	100%			100%	100%

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			logistik pemilu di tingkat Kab.Gowa secara terpadu mulai dari perencanaan, pengadaan dan pengiriman, monitoring dan evaluasi serta pelaporan					
		Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik pemilu	Persentase tertayangnya Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi sirup secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase pelaksanaan pengelolaan dan penghapusan logistik eks pemilu dan pemilukada		100%	100%		
		Tersedianya data kebutuhan logistik	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat	100%			100%	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 3357	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah dokumen Renstra tahun 2015-2019		1 dok			
			Persentase penyelesaian Renja K/L dan RKA K/L secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			(pengelolaan dipa dan revisi dipa)					
		Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih	Persentase pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain				100%	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase terlaksananya layanan operasional dan pelayanan TI (terpeliharanya jaringan kabel internet)		100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepemiluan	Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyelesaian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu (LAKIP, TAPKIN, rencana aksi, Lap. Triwulan berdasarkan PP 39 dan Lap. bulanan berdasarkan PMK 249)	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government	Persentase pelaksanaan sistem aplikasi kepemiluan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		yang konkrit dan terukur						
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 3358	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase keikutsertaan dalam pelantikan pejabat struktural					100%
			Persentase keikutsertaan dalam tes kompetensi dan tes integritas dalam rangka alih status PNS	100%				
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Persentase keikutsertaan dalam pelaksanaan Diklat Teknis dan Diklat Struktural	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan PAW Anggota KPU Kabupaten Gowa	Persentase fasilitasi proses PAW Anggota KPU Kabupaten Gowa			100%	100%	100%
			Pengelolaan database kepegawaian			100%	100%	100%
		Terlaksananya seleksi Anggota KPU Kabupaten Gowa	Persentase fasilitasi proses seleksi anggota KPU Gowa					100%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 3360	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU	Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelaksanaan penghapusan atas	100%	100%			

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat					
			Persentase terselesaikannya tindak lanjut Tuntutan ganti Rugi (TGR) atas BMN yang hilang dengan ditetapkannya pembebanan kerugian Negara kepada penanggungjawab					100%
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Gowa	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN			100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip	Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan	67%	67%	67%	67%	100%
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan di lingkungan KPU kab.Gowa	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Persentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			baik					
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 3361	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%
		Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	Persentase penyusunan LAKIP 2015 yang valid dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP		100%	100%	100%	100%
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU							
1	Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai KPU Gowa					75%
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/Elektronik Kantor KPU Gowa			75%		
C	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK							
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU,	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan	Persentase keikutsertaan dalam penyuluhan	100%		100%	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
3363	Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	penyelesaian sengketa hukum	permasalahan hukum					
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%		100%	100%
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	100%	100%		100%	100%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilu terkait administrasi kepemiluan	Persentase keikutsertaan untuk menghadiri Raker/Rakor dalam rangka pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan		100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan dana kampanye, dan audit dana kampanye					100%
		Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi	100%		100%	100%	100%	

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			hukum yang mutakhir					
		Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase keikutsertaan dalam rangka menghadiri pembekalan/penyuluhan Peraturan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Keputusan KPU Kab.Gowa yang sesuai format peraturan perundang-undangan			100%	100%	100%
2	Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 3364	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Persentase Proses PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah kegiatan pembentukan PPID	1 keg				
			Jumlah kegiatan penataan dan pengisian Anggota DPRD Kab.Gowa					1 Keg
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada		2 dok			1 dok

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Jumlah kegiatan pelaksanaan pemilukada	1 keg			1 keg	
			Persentase keikutsertaan dalam bimtek pemilukada	100%			100%	
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	1 keg	1 keg			1 keg
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah laporan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilukada	1 Lap			1 Lap	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilukada	Jumlah kegiatan penerangan/sosialisasi pemilukada yang dilaksanakan	5 keg			5 keg	
			Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilukada	76%			76%	
			Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilukada	77%			77%	
			Persentase pemilih	50%			50%	

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya					
			Persentase ketepatan waktu dalam fasilitasi proses pencalonan dan verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015	100%				
			Persentase ketepatan waktu pengadaan, ketepatan jumlah, dan kualitas pengadaan barang dan jasa	100%			100%	
			Persentase terfasilitasinya pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015	100%			100%	
			Persentase terfasilitasinya penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	100%				

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Gowa					
			Persentase ketepatan waktu pendistribusian kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	100%			100%	
			Persentase pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada secara tepat waktu	100%			100%	
			Persentase pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih Pemilukada Gowa Tahun 2015 secara tepat waktu	100%				
			Persentase pelaksanaan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan terpilih	100%				
		Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilukada	Persentase ketepatan waktu perekrutan penyelenggara pada Pemilukada	100%			100%	

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi dalam Pemilukada	100%			100%	
			Persentase keikutsertaan KPU Gowa dalam kegiatan terkait Pemilukada yang dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU RI	100%			100%	
			Jumlah kegiatan bimtek penyelenggara Pemilukada yang dilaksanakan oleh KPU Kab.Gowa	7 keg			7 keg	
			Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilukada	0,5%			0,4%	

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU

Rp 17.190.350.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar **Rp 4.655.000.000**

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar **Rp 984.400.000**

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 7 berikut:

Tabel 7
Kerangka Pendanaan Program KPU Gowa selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.346.300.000	3.313.550.000	3.397.800.000	3.524.000.000	4.608.700.000	17.190.350.000
Kegiatan 3355: Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU		1.545.500.000	2.430.000.000	2.452.000.000	2.517.000.000	2.569.000.000	11.513.500.000
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	30.500.000	31.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	160.500.000
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	15.000.000	19.000.000	20.000.000	34.000.000	35.000.000	123.000.000
	Terlaksananya pelayanan perkantoran	1.500.000.000	2.380.000.000	2.400.000.000	2.450.000.000	2.500.000.000	11.230.000.000
Kegiatan 3356: Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu		25.250.000	26.800.000	28.500.000	29.600.000	30.700.000	140.850.000

	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	55.000.000
	Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik pemilu	250.000	300.000	500.000	600.000	700.000	2.350.000
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	15.000.000	16.000.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000	83.500.000
	Tersedianya data kebutuhan logistik						0
Kegiatan 3357: Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		201.000.000	224.500.000	231.000.000	236.000.000	242.000.000	1.134.500.000
	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	23.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000	157.000.000
	Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih	50.000.000	51.500.000	52.000.000	52.500.000	53.000.000	259.000.000
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga	25.000.000	32.000.000	34.000.000	35.000.000	37.000.000	163.000.000
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	85.000.000
	Tersedianya data dan informasi kepemiluan	67.000.000	71.000.000	72.000.000	72.500.000	73.000.000	355.500.000
	Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	115.000.000

Kegiatan 3358: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		30.150.000	33.400.000	34.800.000	36.400.000	1.008.500.000	1.143.250.000
	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	2.150.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	11.550.000
	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	8.000.000	8.200.000	8.500.000	9.000.000	10.000.000	43.700.000
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan PAW Anggota KPU Kabupaten Gowa	20.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000	118.000.000
	Terlaksananya seleksi Anggota KPU Kabupaten Gowa					970.000.000	970.000.000
Kegiatan 3360: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		539.200.000	590.550.000	642.500.000	695.000.000	747.500.000	3.214.750.000
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU	17.000.000	17.500.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	91.500.000
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Gowa	2.200.000	2.250.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	14.950.000
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip	10.000.000	10.300.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	53.300.000
	Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	55.000.000
	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	500.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000	3.000.000.000
Kegiatan 3361: Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		5.200.000	8.300.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	43.500.000

	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU						0
	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1.200.000	3.300.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	16.500.000
	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	27.000.000
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	750.000.000	800.000.000	950.000.000	1.020.000.000	1.135.000.000	4.655.000.000
Kegiatan 3362: Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana		750.000.000	800.000.000	950.000.000	1.020.000.000	1.135.000.000	4.655.000.000
	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	350.000.000	400.000.000	450.000.000	470.000.000	500.000.000	2.170.000.000
	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	400.000.000	400.000.000	500.000.000	550.000.000	635.000.000	2.485.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	158.200.000	174.500.000	202.500.000	218.500.000	230.700.000	984.400.000
Kegiatan 3363: Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu		34.200.000	43.500.000	44.000.000	45.500.000	47.000.000	214.200.000
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	11.600.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	76.600.000
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilu terkait administrasi pemilihan	12.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	69.000.000

	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	10.600.000	14.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	68.600.000
Kegiatan 3364: Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih		124.000.000	131.000.000	158.500.000	173.000.000	183.700.000	770.200.000
	Meningkatkan kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32.000.000	33.000.000	35.000.000	39.000.000	44.000.000	183.000.000
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu	70.000.000	75.000.000	100.000.000	110.000.000	115.000.000	470.000.000
	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu	22.000.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000	24.700.000	117.200.000
	TOTAL	3.254.500.000	4.288.050.000	4.550.300.000	#####	#####	22.829.750.000

Rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Gowa selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.346.300.000	3.313.550.000	3.397.800.000	3.524.000.000	4.608.700.000	17.190.350.000
3355	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	1.545.500.000	2.430.000.000	2.452.000.000	2.517.000.000	2.569.000.000	11.513.500.000
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	25.250.000	26.800.000	28.500.000	29.600.000	30.700.000	140.850.000
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	201.000.000	224.500.000	231.000.000	236.000.000	242.000.000	1.134.500.000
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	30.150.000	33.400.000	34.800.000	36.400.000	1.008.500.000	1.143.250.000
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	539.200.000	590.550.000	642.500.000	695.000.000	747.500.000	3.214.750.000
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	5.200.000	8.300.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	43.500.000

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	750.000.000	800.000.000	950.000.000	1.020.000.000	1.135.000.000	4.655.000.000
3362	Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	750.000.000	800.000.000	950.000.000	1.020.000.000	1.135.000.000	4.655.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	158.200.000	174.500.000	202.500.000	218.500.000	230.700.000	984.400.000
3363	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	34.200.000	43.500.000	44.000.000	45.500.000	47.000.000	214.200.000
3364	Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	124.000.000	131.000.000	158.500.000	173.000.000	183.700.000	770.200.000
	Total	3.254.500.000	4.288.050.000	4.550.300.000	4.762.500.000	5.974.400.000	22.829.750.000

Rincian anggaran untuk setiap sasaran, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9
Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan KPU Gowa
selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.346.300.000	3.313.550.000	3.397.800.000	3.524.000.000	4.608.700.000	17.190.350.000
Kegiatan 3355: Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU		1.545.500.000	2.430.000.000	2.452.000.000	2.517.000.000	2.569.000.000	11.513.500.000
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	30.500.000	31.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	160.500.000
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	15.000.000	19.000.000	20.000.000	34.000.000	35.000.000	123.000.000
	Terlaksananya pelayanan perkantoran	1.500.000.000	2.380.000.000	2.400.000.000	2.450.000.000	2.500.000.000	11.230.000.000
Kegiatan 3356: Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu		25.250.000	26.800.000	28.500.000	29.600.000	30.700.000	140.850.000

	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	55.000.000
	Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik pemilu	250.000	300.000	500.000	600.000	700.000	2.350.000
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	15.000.000	16.000.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000	83.500.000
	Tersedianya data kebutuhan logistik						0
Kegiatan 3357: Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		201.000.000	224.500.000	231.000.000	236.000.000	242.000.000	1.134.500.000
	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	23.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000	157.000.000
	Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih	50.000.000	51.500.000	52.000.000	52.500.000	53.000.000	259.000.000
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga	25.000.000	32.000.000	34.000.000	35.000.000	37.000.000	163.000.000
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	85.000.000
	Tersedianya data dan informasi kepemiluan	67.000.000	71.000.000	72.000.000	72.500.000	73.000.000	355.500.000
	Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	115.000.000

Kegiatan 3358: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		30.150.000	33.400.000	34.800.000	36.400.000	1.008.500.000	1.143.250.000
	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	2.150.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	11.550.000
	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	8.000.000	8.200.000	8.500.000	9.000.000	10.000.000	43.700.000
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan PAW Anggota KPU Kabupaten Gowa	20.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000	118.000.000
	Terlaksananya seleksi Anggota KPU Kabupaten Gowa					970.000.000	970.000.000
Kegiatan 3360: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		539.200.000	590.550.000	642.500.000	695.000.000	747.500.000	3.214.750.000
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU	17.000.000	17.500.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	91.500.000
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Gowa	2.200.000	2.250.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	14.950.000
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip	10.000.000	10.300.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	53.300.000
	Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	55.000.000
	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	500.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000	3.000.000.000
Kegiatan 3361: Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		5.200.000	8.300.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	43.500.000

	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU						0
	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1.200.000	3.300.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	16.500.000
	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	27.000.000
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	750.000.000	800.000.000	950.000.000	1.020.000.000	1.135.000.000	4.655.000.000
Kegiatan 3362: Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana		750.000.000	800.000.000	950.000.000	1.020.000.000	1.135.000.000	4.655.000.000
	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	350.000.000	400.000.000	450.000.000	470.000.000	500.000.000	2.170.000.000
	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	400.000.000	400.000.000	500.000.000	550.000.000	635.000.000	2.485.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	158.200.000	174.500.000	202.500.000	218.500.000	230.700.000	984.400.000
Kegiatan 3363: Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu		34.200.000	43.500.000	44.000.000	45.500.000	47.000.000	214.200.000
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	11.600.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	76.600.000

	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilu terkait administrasi kepiluan	12.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	69.000.000
	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	10.600.000	14.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	68.600.000
Kegiatan 3364: Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih		124.000.000	131.000.000	158.500.000	173.000.000	183.700.000	770.200.000
	Meningkatkan kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32.000.000	33.000.000	35.000.000	39.000.000	44.000.000	183.000.000
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilukada	70.000.000	75.000.000	100.000.000	110.000.000	115.000.000	470.000.000
	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilukada	22.000.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000	24.700.000	117.200.000
	TOTAL	3.254.500.000	4.288.050.000	4.550.300.000	4.762.500.000	5.974.400.000	22.829.750.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Gowa. Didalamnya dijabarkan terkait visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program/kegiatan, sasaran program kegiatan, beserta indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2015-2019.

Rencana strategis KPU Kabupaten Gowa tahun 2015-2019 akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang akan diimplementasikan kedalam Perjanjian Kinerja untuk setiap tahunnya selama lima tahun (2015-2019).

Target kinerja beserta Kerangka Pendanaan yang telah ditetapkan disusun dengan mengacu pada target beserta pendanaan pada tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk tahun 2015-2019. Penyusunan target beserta kerangka pendanaan disesuaikan pula dengan tahapan pemilihan yang akan dihadapi selama kurun waktu 2015-2019, yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018, serta Pemilihan Legislatif beserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Demikian dokumen perencanaan strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga dapat terwujud sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Sungguminasa, 29 Januari 2016

Ketua

ZAINAL RUMA, S.Pd., MM

LAMPIRAN I: Matriks Kinerja dan Pendanaan

Tabel 10
Matriks Kinerja dan Pendanaan 2015-2019
KPU kab.Gowa

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (dalam rupiah)					Penanggungjawab Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU								2.346.300.000	3.313.550.000	3.397.800.000	3.524.000.000	4.608.700.000	17.190.350.000
Kegiatan 3355: Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU								1.545.500.000	2.430.000.000	2.452.000.000	2.517.000.000	2.569.000.000	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Divisi yang menangani
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan							30.500.000	31.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	160.500.000
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran							15.000.000	19.000.000	20.000.000	34.000.000	35.000.000	123.000.000
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						

	Terlaksananya pelayanan perkantoran							1.500.000.000	2.380.000.000	2.400.000.000	2.450.000.000	2.500.000.000	11.230.000.000
		Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
Kegiatan 3356: Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu								25.250.000	26.800.000	28.500.000	29.600.000	30.700.000	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Divisi yang menangani
	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu							10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	55.000.000
		Persentase terupdatenya data-data dan informasi logistik pada aplikasi silog	100%	100%		100%	100%						
		Persentase pelaksanaan pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat Kab.Gowa secara terpadu mulai dari perencanaan, pengadaan dan pengiriman, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	100%			100%	100%						
	Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik pemilu							250.000	300.000	500.000	600.000	700.000	2.350.000

		Persentase tertayangnya Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi sirup secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik							15.000.000	16.000.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000	83.500.000
		Persentase pelaksanaan pengelolaan dan penghapusan logistik eks pemilu dan pemilukada		100%	100%								
	Tersedianya data kebutuhan logistik							0	0	0	0	0	
		Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat	100%			100%	100%						
Kegiatan 3357: Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data								201.000.000	224.500.000	231.000.000	236.000.000	242.000.000	Sub Bagian Program dan Data; Divisi yang menangani
	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi							23.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000	157.000.000

		Jumlah dokumen Renstra tahun 2015-2019		1 dok									
		Persentase penyelesaian Renja K/L dan RKA K/L secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		Persentase perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu (pengelolaan dipa dan revisi dipa)	100%	100%	100%	100%	100%						
	Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih							50.000.000	51.500.000	52.000.000	52.500.000	53.000.000	259.000.000
		Persentase pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%	100%	100%						
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga							25.000.000	32.000.000	34.000.000	35.000.000	37.000.000	163.000.000
		Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain				100%	100%						
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien							15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	85.000.000

		Persentase terlaksananya layanan operasional dan pelayanan TI (terpeliharanya jaringan kabel internet)		100%	100%	100%	100%						
	Tersedianya data dan informasi kepemiluan							67.000.000	71.000.000	72.000.000	72.500.000	73.000.000	355.500.000
		Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%						
		Persentase penyelesaian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu (LAKIP, TAPKIN, rencana aksi, Lap. Triwulan berdasarkan PP 39 dan Lap. bulanan berdasarkan PMK 249)	100%	100%	100%	100%	100%						
	Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur							21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	115.000.000
		Persentase pelaksanaan sistem aplikasi kepemiluan	100%	100%	100%	100%	100%						

Kegiatan 3358: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian								30.150.000	33.400.000	34.800.000	36.400.000	1.008.500.000	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Divisi yang menangani
	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia							2.150.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	11.550.000
		Persentase keikutsertaan dalam pelantikan pejabat struktural					100%						
		Persentase keikutsertaan dalam tes kompetensi dan tes integritas dalam rangka alih status PNS	100%										
	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural							8.000.000	8.200.000	8.500.000	9.000.000	10.000.000	43.700.000
		Persentase keikutsertaan dalam pelaksanaan Diklat Teknis dan Diklat Struktural	100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan PAW Anggota KPU Kabupaten Gowa							20.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000	118.000.000
		Persentase fasilitasi proses PAW Anggota KPU Kabupaten Gowa			100%	100%	100%						
		Pengelolaan database kepegawaian			100%	100%	100%						

	Terlaksananya seleksi Anggota KPU Kabupaten Gowa							0	0	0	0	970.000.000	970.000.000
		Persentase fasilitasi proses seleksi anggota KPU Gowa					100%						
Kegiatan 3360: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU								539.200.000	590.550.000	642.500.000	695.000.000	747.500.000	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Divisi yang menangani
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU							17.000.000	17.500.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	91.500.000
		Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK	100%	100%	100%	100%	100%						
		Persentase pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat	100%	100%									
		Persentase terselesaikannya tindak lanjut Tuntutan ganti Rugi (TGR) atas BMN yang hilang dengan ditetapkannya pembebanan kerugian Negara kepada penanggungjawab					100%						

	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Gowa							2.200.000	2.250.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	14.950.000
		Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN			100%	100%	100%						
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip							10.000.000	10.300.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	53.300.000
		Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan	67%	67%	67%	67%	100%						
	Meningkatnya layanan dukungan pengamanan							10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	55.000.000
		Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan di lingkungan KPU kab.Gowa	100%	100%	100%	100%	100%						
	Meningkatnya sarana layanan perkantoran							500.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000	3.000.000.000
		Persentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						

Kegiatan 3361: Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota								5.200.000	8.300.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	Sub Bagian Program dan Data; Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Divisi yang menangani
	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU							0	0	0	0	0	
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%						
	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP							1.200.000	3.300.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	16.500.000
		Persentase penyusunan LAKIP 2015 yang valid dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan							4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	27.000.000
		Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP		100%	100%	100%	100%						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU								750.000.000	800.000.000	950.000.000	1.020.000.000	1.135.000.000	4.655.000.000
Kegiatan 3362: Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana								750.000.000	800.000.000	950.000.000	1.020.000.000	1.135.000.000	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Divisi yang menangani

	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai							350.000.000	400.000.000	450.000.000	470.000.000	500.000.000	2.170.000.000
		Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai KPU Gowa					75%						
	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran							400.000.000	400.000.000	500.000.000	550.000.000	635.000.000	2.485.000.000
		Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/Elektronik Kantor KPU Gowa					75%						
PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								158.200.000	174.500.000	202.500.000	218.500.000	230.700.000	984.400.000
Kegiatan 3363: Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu								34.200.000	43.500.000	44.000.000	45.500.000	47.000.000	Sub Bagian Hukum; Divisi yang menangani
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum							11.600.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	76.600.000

		Persentase keikutsertaan dalam penyuluhan permasalahan hukum	100%		100%	100%	100%						
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%		100%	100%						
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	100%	100%		100%	100%						
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilu terkait administrasi kepiluan							12.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	69.000.000
		Persentase keikutsertaan untuk menghadiri Raker/Rakor dalam rangka pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepiluan		100%	100%	100%	100%						

		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan dana kampanye, dan audit dana kampanye					100%						
		Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100%		100%	100%	100%						
	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan							10.600.000	14.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	68.600.000
		Persentase keikutsertaan dalam rangka menghadiri pembekalan/penyuluhan Peraturan KPU	100%	100%	100%	100%	100%						
		Persentase Keputusan KPU Kab.Gowa yang sesuai format peraturan perundang-undangan			100%	100%	100%						
Kegiatan 3364: Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih								124.000.000	131.000.000	158.500.000	173.000.000	183.700.000	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; Divisi yang menangani

	Meningkatkan kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							32.000.000	33.000.000	35.000.000	39.000.000	44.000.000	183.000.000
		Persentase Proses PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						
		Jumlah kegiatan pembentukan PPID	1 keg										
		Jumlah kegiatan penataan dan pengisian Anggota DPRD Kab. Gowa					1 Keg						
		Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada		2 dok			1 dok						
		Jumlah kegiatan pelaksanaan pemilukada	1 keg				1 keg						
		Persentase keikutsertaan dalam bimtek pemilukada	100%				100%						
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	1 keg	1 keg			1 keg						

		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%						
		Jumlah laporan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilukada	1 Lap			1 Lap							
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilukada							70.000.000	75.000.000	100.000.000	110.000.000	115.000.000	470.000.000
		Jumlah kegiatan penerangan/sosialisasi pemilukada yang dilaksanakan	5 keg			5 keg							
		Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilukada	76%			76%							
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilukada	77%			77%							
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	50%			50%							
		Persentase ketepatan waktu dalam fasilitasi proses pencalonan dan verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015	100%										

		Persentase ketepatan waktu pengadaan, ketepatan jumlah, dan kualitas pengadaan barang dan jasa	100%			100%							
		Persentase terfasilitasinya pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015	100%			100%							
		Persentase terfasilitasinya penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa	100%										
		Persentase ketepatan waktu pendistribusian kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	100%			100%							
		Persentase pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada secara tepat waktu	100%			100%							

		Persentase pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih Pemilukada Gowa Tahun 2015 secara tepat waktu	100%										
		Persentase pelaksanaan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan terpilih	100%										
	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilukada						22.000.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000	24.700.000	117.200.000	
		Persentase ketepatan waktu perekrutan penyelenggara pada Pemilukada	100%			100%							
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi dalam Pemilukada	100%			100%							
		Persentase keikutsertaan KPU Gowa dalam kegiatan terkait Pemilukada yang dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU RI	100%			100%							

		Jumlah kegiatan bimtek penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kab.Gowa	7 keg			7 keg							
		Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,50%			0,40%							
TOTAL							3.254.500.000	4.288.050.000	4.550.300.000	4.762.500.000	5.974.400.000	22.829.750.000	

Lampiran II : Sekilas Tentang Pemilihan di Kabupaten Gowa

Sebagai lembaga yang baru terbentuk pada tahun 2009 melalui Keputusan KPU Nomor:451/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melaksanakan pemilihan pada tahun 2010 yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2010. Pemilihan kedua yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. Kemudian satu tahun berikutnya yaitu pada tahun 2014, dilaksanakan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pada tahun 2015, KPU Kabupaten Gowa kembali akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa yang merupakan pemilihan serentak untuk pertama kalinya.

1. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2010

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 diikuti oleh 4 Pasangan Calon:

Tabel 11
Hasil Perolehan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2010

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan
1	Ahmad Pidris Zain & Abdul Ravy Rasyid	6.206
2	Andi Maddusila A Idjo & Jamaluddin Rustam	134.409
3	Drs. H. A. Mappaturung & Drs. H.M. Burhanuddin M	2.165
4	H. Ichsan Yasil Limpoo & H. Abd. Razak Badjidu	184.628

Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak sebanyak 334.640 pemilih dengan rincian :

Suara Sah : 327.408 Suara atau 97,89%

Suara Tidak Sah : 7.052 Suara atau 2,11%

**Tabel 12
Hasil Persentase
Perolehan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2010**

No	Nama Pasangan Calon	Persentase Perolehan Suara
1	Ahmad Pidris Zain & Abdul Ravy Rasyid	1,90%
2	Andi Maddusila A Idjo & Jamaluddin Rustam	41,05%
3	Drs. H. A. Mappaturung & Drs. H.M. Burhanuddin M	0,66%
4	H. Ichsan Yasil Limpo & H. Abd. Razak Badjidu	56,39%

Berdasarkan hasil perolehan tersebut,

Nama Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa	Keterangan
H. Ichsan Yasin Limpo, SH, MH	Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Gowa
Dan	Dan
H. Abd. Razak Badjidu, S.Sos	Calon Terpilih Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa

memperoleh suara tertinggi dan ditetapkanlah menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa periode 2010 – 2015.

2. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 untuk wilayah Kabupaten Gowa

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 diikuti oleh 3 pasangan calon, dengan hasil sebagai berikut untuk wilayah Kabupaten Gowa :

Tabel 13
Hasil Perolehan Pilgub Sulsel Tahun 2013
Tingkat Kabupaten Gowa

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN
1	Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Ir. H. Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, M. Si	66.542
2	DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH dan Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, MS	312.199
3	Andi Rudyanto Asapa, SH dan Drs. H. Andi Nawir Pasinringi, MP	8.603

Dengan grafik sebagai berikut :







**PERSENTASAH PARTISIPASI PEMILIH PER KECAMATAN
PEMILIHAN CABURPILIH & WAKIL KABUPATEN TULTEL 2013**

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	No Urut	Jumlah Suara	Partai Politik		Tidak Terpilih		Keterangan
					Partai Politik	Partai Politik	Partai Politik	Partai Politik	
1	Bontomatene	1000	1	1000	1000	1000	0	0	
2	Bontolene	1000	2	1000	1000	1000	0	0	
3	Bontolene	1000	3	1000	1000	1000	0	0	
4	Bontolene	1000	4	1000	1000	1000	0	0	
5	Bontolene	1000	5	1000	1000	1000	0	0	
6	Bontolene	1000	6	1000	1000	1000	0	0	
7	Bontolene	1000	7	1000	1000	1000	0	0	
8	Bontolene	1000	8	1000	1000	1000	0	0	
9	Bontolene	1000	9	1000	1000	1000	0	0	
10	Bontolene	1000	10	1000	1000	1000	0	0	
11	Bontolene	1000	11	1000	1000	1000	0	0	
12	Bontolene	1000	12	1000	1000	1000	0	0	
13	Bontolene	1000	13	1000	1000	1000	0	0	
14	Bontolene	1000	14	1000	1000	1000	0	0	
15	Bontolene	1000	15	1000	1000	1000	0	0	
16	Bontolene	1000	16	1000	1000	1000	0	0	
17	Bontolene	1000	17	1000	1000	1000	0	0	
18	Bontolene	1000	18	1000	1000	1000	0	0	
19	Bontolene	1000	19	1000	1000	1000	0	0	
20	Bontolene	1000	20	1000	1000	1000	0	0	
21	Bontolene	1000	21	1000	1000	1000	0	0	
22	Bontolene	1000	22	1000	1000	1000	0	0	
23	Bontolene	1000	23	1000	1000	1000	0	0	
24	Bontolene	1000	24	1000	1000	1000	0	0	
25	Bontolene	1000	25	1000	1000	1000	0	0	
26	Bontolene	1000	26	1000	1000	1000	0	0	
27	Bontolene	1000	27	1000	1000	1000	0	0	
28	Bontolene	1000	28	1000	1000	1000	0	0	
29	Bontolene	1000	29	1000	1000	1000	0	0	
30	Bontolene	1000	30	1000	1000	1000	0	0	
31	Bontolene	1000	31	1000	1000	1000	0	0	
32	Bontolene	1000	32	1000	1000	1000	0	0	
33	Bontolene	1000	33	1000	1000	1000	0	0	
34	Bontolene	1000	34	1000	1000	1000	0	0	
35	Bontolene	1000	35	1000	1000	1000	0	0	
36	Bontolene	1000	36	1000	1000	1000	0	0	
37	Bontolene	1000	37	1000	1000	1000	0	0	
38	Bontolene	1000	38	1000	1000	1000	0	0	
39	Bontolene	1000	39	1000	1000	1000	0	0	
40	Bontolene	1000	40	1000	1000	1000	0	0	
41	Bontolene	1000	41	1000	1000	1000	0	0	
42	Bontolene	1000	42	1000	1000	1000	0	0	
43	Bontolene	1000	43	1000	1000	1000	0	0	
44	Bontolene	1000	44	1000	1000	1000	0	0	
45	Bontolene	1000	45	1000	1000	1000	0	0	
46	Bontolene	1000	46	1000	1000	1000	0	0	
47	Bontolene	1000	47	1000	1000	1000	0	0	
48	Bontolene	1000	48	1000	1000	1000	0	0	
49	Bontolene	1000	49	1000	1000	1000	0	0	
50	Bontolene	1000	50	1000	1000	1000	0	0	
51	Bontolene	1000	51	1000	1000	1000	0	0	
52	Bontolene	1000	52	1000	1000	1000	0	0	
53	Bontolene	1000	53	1000	1000	1000	0	0	
54	Bontolene	1000	54	1000	1000	1000	0	0	
55	Bontolene	1000	55	1000	1000	1000	0	0	
56	Bontolene	1000	56	1000	1000	1000	0	0	
57	Bontolene	1000	57	1000	1000	1000	0	0	
58	Bontolene	1000	58	1000	1000	1000	0	0	
59	Bontolene	1000	59	1000	1000	1000	0	0	
60	Bontolene	1000	60	1000	1000	1000	0	0	
61	Bontolene	1000	61	1000	1000	1000	0	0	
62	Bontolene	1000	62	1000	1000	1000	0	0	
63	Bontolene	1000	63	1000	1000	1000	0	0	
64	Bontolene	1000	64	1000	1000	1000	0	0	
65	Bontolene	1000	65	1000	1000	1000	0	0	
66	Bontolene	1000	66	1000	1000	1000	0	0	
67	Bontolene	1000	67	1000	1000	1000	0	0	
68	Bontolene	1000	68	1000	1000	1000	0	0	
69	Bontolene	1000	69	1000	1000	1000	0	0	
70	Bontolene	1000	70	1000	1000	1000	0	0	
71	Bontolene	1000	71	1000	1000	1000	0	0	
72	Bontolene	1000	72	1000	1000	1000	0	0	
73	Bontolene	1000	73	1000	1000	1000	0	0	
74	Bontolene	1000	74	1000	1000	1000	0	0	
75	Bontolene	1000	75	1000	1000	1000	0	0	
76	Bontolene	1000	76	1000	1000	1000	0	0	
77	Bontolene	1000	77	1000	1000	1000	0	0	
78	Bontolene	1000	78	1000	1000	1000	0	0	
79	Bontolene	1000	79	1000	1000	1000	0	0	
80	Bontolene	1000	80	1000	1000	1000	0	0	
81	Bontolene	1000	81	1000	1000	1000	0	0	
82	Bontolene	1000	82	1000	1000	1000	0	0	
83	Bontolene	1000	83	1000	1000	1000	0	0	
84	Bontolene	1000	84	1000	1000	1000	0	0	
85	Bontolene	1000	85	1000	1000	1000	0	0	
86	Bontolene	1000	86	1000	1000	1000	0	0	
87	Bontolene	1000	87	1000	1000	1000	0	0	
88	Bontolene	1000	88	1000	1000	1000	0	0	
89	Bontolene	1000	89	1000	1000	1000	0	0	
90	Bontolene	1000	90	1000	1000	1000	0	0	
91	Bontolene	1000	91	1000	1000	1000	0	0	
92	Bontolene	1000	92	1000	1000	1000	0	0	
93	Bontolene	1000	93	1000	1000	1000	0	0	
94	Bontolene	1000	94	1000	1000	1000	0	0	
95	Bontolene	1000	95	1000	1000	1000	0	0	
96	Bontolene	1000	96	1000	1000	1000	0	0	
97	Bontolene	1000	97	1000	1000	1000	0	0	
98	Bontolene	1000	98	1000	1000	1000	0	0	
99	Bontolene	1000	99	1000	1000	1000	0	0	
100	Bontolene	1000	100	1000	1000	1000	0	0	

3. Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014

Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, terdapat 6 Daerah Pemilihan (Dapil) di Kab.Gowa. Sebelum menetapkan hasil dan menetapkan calon terpilih Pemilu Legislatif Tahun 2014 di tingkat Kab.Gowa, terlebih dahulu KPU Kabupaten TorajaUtara menetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh semua Partai Politik di masing-masing Daerah Pemilihan dengan jumlah kursi masing-masing Daerah Pemilihan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh data:

Tabel 14
Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP)
pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Kab.Gowa

No.	Daerah Pemilihan	BPP
1	Gowa 1	140.584
2	Gowa 2	86.811
3	Gowa 3	62.371
4	Gowa 4	89.706
5	Gowa 5	69.682
6	Gowa 6	86.434
7	Gowa 7	146.437

Adapun Urutan Perolehan Suara masing-masing Partai Politik di masing-masing Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Perolehan Suara Partai Politik Daerah Pemilihan Gowa I

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI NASDEM	2.222	-
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.860	1
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2.272	-
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9.185	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	7.986	1
6	PARTAI GERINDRA	12.710	2
7	PARTAI DEMOKRAT	5.460	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	4.847	1

9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11.540	2
10	PARTRAI HATI NURANI RAKYAT	3.496	-
11	PARTAI BULAN BINTANG	489	-
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.606	-
	JUMLAH	65.673	9

Tabel 16

Perolehan Suara Partai Politik Daerah Pemilihan Gowa II

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI NASDEM	4.558	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.266	-
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1.300	-
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	2.381	-
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	16.219	2
6	PARTAI GERINDRA	6.198	1
7	PARTAI DEMOKRAT	4.652	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.215	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.793	-
10	PARTRAI HATI NURANI RAKYAT	3.382	-
11	PARTAI BULAN BINTANG	212	-
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	182	-
	JUMLAH	50.358	6

Tabel 17
Perolehan Suara Partai Politik Daerah Pemilihan Gowa III

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI NASDEM	435	-
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.416	-
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	3.828	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.298	-
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6.347	1
6	PARTAI GERINDRA	2.244	-
7	PARTAI DEMOKRAT	2.812	-
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.479	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.899	1
10	PARTRAI HATI NURANI RAKYAT	2.562	-
11	PARTAI BULAN BINTANG	1.717	-
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.597	-
	JUMLAH	37.634	4

Tabel 18
Perolehan Suara Partai Politik Daerah Pemilihan Gowa IV

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI NASDEM	2.929	-

2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.822	-
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	3.921	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5.097	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	12.032	1
6	PARTAI GERINDRA	9.776	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1.819	-
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	8.309	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.592	1
10	PARTRAI HATI NURANI RAKYAT	2.076	-
11	PARTAI BULAN BINTANG	1.631	-
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.967	-
	JUMLAH	58.971	6

Tabel 19

Perolehan Suara Partai Politik Daerah Pemilihan Gowa V

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI NASDEM	656	-
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	574	-
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1.061	-
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5.590	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	11.349	1
6	PARTAI GERINDRA	4.656	1

7	PARTAI DEMOKRAT	5.706	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	4.345	-
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.614	-
10	PARTRAI HATI NURANI RAKYAT	3.239	-
11	PARTAI BULAN BINTANG	300	-
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.341	-
	JUMLAH	43.431	4

Tabel 20

Perolehan Suara Partai Politik Daerah Pemilihan Gowa VI

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI NASDEM	7.279	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.862	-
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	5.354	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	3.834	-
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	9.679	1
6	PARTAI GERINDRA	4.589	1
7	PARTAI DEMOKRAT	4.466	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.739	-
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.421	1
10	PARTRAI HATI NURANI RAKYAT	2.959	-
11	PARTAI BULAN BINTANG	205	-

12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.388	-
	JUMLAH	51.775	6

Tabel 21
Perolehan Suara Partai Politik Daerah Pemilihan Gowa VII

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI NASDEM	5.582	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.935	-
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2.023	-
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	7.177	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	17.589	2
6	PARTAI GERINDRA	12.503	2
7	PARTAI DEMOKRAT	3.684	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.653	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8.933	1
10	PARTRAI HATI NURANI RAKYAT	7.058	1
11	PARTAI BULAN BINTANG	2.359	-
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	691	-
	JUMLAH	78.187	10

Calon Terpilih untuk masing-masing Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa I

No.	PARTAI POLITIK	No. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	Drs. H. ABD. LATIF HAFID	1.067	1
2	PDI PERJUANGAN	1	ANDI HIKMAWATI. A. KUMALA IDJO, S.Sos	4.792	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	A. MUH. ISHAK, SE	1.856	1
4	PARTAI GERINDRA	1	H. HAMLII HALIM, SE.,MM	2.581	2
5	PARTAI GERINDRA	5	H. FAISAL ACHMAD	2.661	1
6	PARTAI DEMOKRAT	1	ANDI LUKMAN, MM DG. NABA	2.762	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	ABD. HARIS TAPPA	1.798	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	H. NUR AS'AD HIJAZ DG. TAYANG	3.137	2
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNA	5	SAHIR DG. PASANG	3.615	1

Tabel 23
Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa II

No.	PARTAI POLITIK	No. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	Partai NasDem	6	Ir. MUHAMMAD AMIR ALI	2.757	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Hj. MUSSADIYAH RAUF	6.340	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	HJ. IRMAWATI HAERUDDIN, SE	3.548	2
4	PARTAI GERINDRA	1	H. ABD. HARIS L. KR. SILA	2.742	1
5	PARTAI DEMOKRAT	1	Dra. Hj. SUTIHATI DAHLAN	3.020	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	ST. HASNAH RESTU	1.646	1

Tabel 24
Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa III

No.	PARTAI POLITIK	No. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	AGUSSALIM NAKKU	1.589	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	NISWAH DG. NGINGA	2.438	1
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	H. M. JUFRI	2.601	1
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	H.RAFIUDDIN DG. RAPING	3.569	1

Tabel 25
Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa IV

No.	PARTAI POLITIK	No. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H. MUHAMMADONG DG. RATE, SE	2.446	1
2	PDI PERJUANGAN	1	MUH. NATSIR DG. SEGA, S.Pd	2.220	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	MUH. KASIM SILA, S.Kom	2.672	1
4	PARTAI GERINDRA	6	ABDUL RASAK, SE	3.767	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	A. MUH. YUSUF HARUN, ST., M.Si	3.977	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	Drs. H. MUH. BASIR, M.Si DG. BELLA	1.704	1

Tabel 26
Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa V

No.	PARTAI POLITIK	No. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PDI PERJUANGAN	4	SYAMSUDDIN SAPPARA NOMBONG DG. TIKA	2.617	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	AKBAR DANU INDARTA	4.631	1
3	PARTAI GERINDRA	1	H. AHMAD TOMBONG	2.052	1
4	PARTAI DEMOKRAT	4	ASRIADY ARASY, ST	3.013	1

Tabel 27
Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa VI

No.	PARTAI POLITIK	No. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI NASDEM	1	CAPT. HARIADI, SE.,M.Mar	3.466	1
2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	H. MUH FITRIADY	1.540	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Dra. Hj. SYAMSUHARNI DG. TACO	2.498	1
4	PARTAI GERINDRA	2	NASRUDDIN, S.Sos DG. SITAKKA	2.005	1
5	PARTAI DEMOKRAT	6	H. JAMALUDDIN TIRO, SH. MH	1930	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	PATTOLO DG. MAROLA	1.905	1

Tabel 27
Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gowa VII

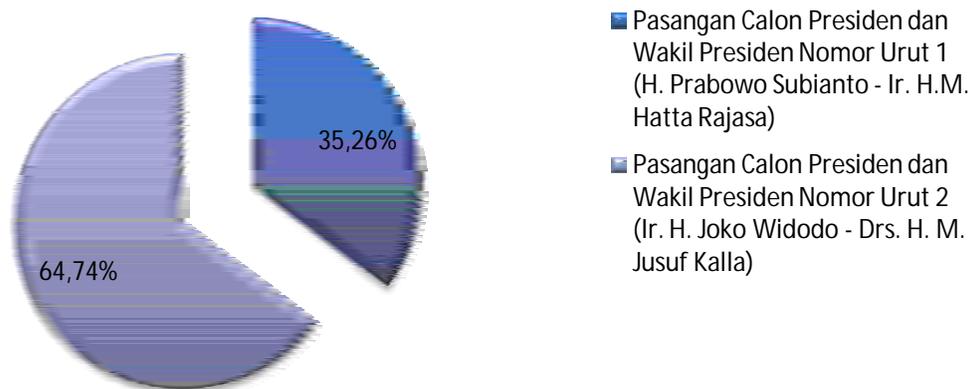
No.	PARTAI POLITIK	No. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	Partai NasDem	1	EKA SURYADI	2.206	1
2	PDI PERJUANGAN	1	MUH. RAMLI SIDDIK DG. REWA, S.SOS	3.907	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	H. ANZAR ZAENAL BATE, SE	2.776	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	7	Hj. HASMAWATI DG. LINO	4.436	1
5	PARTAI GERINDRA	1	H. MUH. SAID ITUNG, SE	4.784	1
6	PARTAI GERINDRA	4	ROBBY HARUN	2.427	2
7	PARTAI DEMOKRAT	1	MAKMUR DG.MUANG		1

				929	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	8	MAPPAUDANG DG. LINGKA, S.Sos	3.142	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. MUH. DAHLAN DG. TAWANG	2.770	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	9	JABBAR DG NGITUNG	1.785	1

4. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, untuk tingkat Kab.Gowa diperoleh hasil perolehan suara tertinggi diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Ir.H.Joko Widodo-Drs.H.M.Jusuf Kalla yaitu sebesar 83.471 suara atau 68,16%, sementara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 yaitu Pasangan H.Prabowo Subianto-Ir.H.M.Hatta Rajasa memperoleh 38.990 suara atau 31,84%.

Gambar 4
Hasil Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Tingkat Kab. Gowa



Sejak terbentuk hingga tahun 2014, KPU Kabupaten Gowa telah melaksanakan 12 kali pemilihan, dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih

dan partisipasi pemilih perempuan dari Pemilu 2010 hingga 2015 sebagai berikut:

Gambar 5
Partisipasi Pemilih Kabupaten Gowa

